



**AKUNTANSI
DEWANTARA**

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

JURNAL.USTJOGJA.AC.ID



METODE PREDIKSI *FINANCIAL DISTRESS* DI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TENGAH UNTUK MENGUKUR KESEJAHTERAAN UMMAT

Dedi Rusdi

Khoirul Fuad

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

email: khoirulfuad@unissula.ac.id

ABSTRACT

This study aims to predict financial distress in local government by simply measuring from the financial side using an analysis of the independence of local governments in obtaining revenue, alignment spending by local governments that not only focused on routine spending and the ratio of local revenue growth. This study measures the financial distress of a local government from 3 (three) categories of financial independence, shopping alignment, and PAD growth. The object of this study is the data of local government financial reports in the province of Central Java. The number of samples used in this study is 28. Data were analyzed by using binary logistic regression. This study finds that local government in Central Java is still experiencing financial distress condition due to extravagant behavior still happened proved by amount of expenditure for operational need and requirement of salary of employees either direct expenditure or indirect expenditure while infrastructure expenditure and public service percentage is smaller, beside that the utilization of assets and the extracting of natural resources is also not maximal so that the welfare of the people feels less than optimal.

INFO ARTIKEL

Diterima: 4 Januari 2018

Direview: 5 Februari 2018

Disetujui: 13 April 2018

Terbit: 30 April 2018

Keyword:

financial distress, local government, regional financing.

PENDAHULUAN

Entitas pemerintah terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada masa pemerintahan orde baru, pemerintah pusat melakukan seluruh pengaturan ekonomi, sehingga pemerintah pusat menyokong sepenuhnya dana yang dibutuhkan daerah dalam rangka membiayai seluruh kegiatan pemerintah daerah untuk membiayai seluruh kegiatan yang dilakukan pemerintah guna mendukung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah tidak perlu berupaya untuk mendapatkan penghasilan guna membiayai seluruh kegiatan pemerintah daerah. Krisis yang dialami Indonesia tahun 1996 hingga tahun 1997 mengakibatkan reformasi total pemerintahan yang semula dari orde baru kemudian beralih ke sistem otonomi daerah yang mengenalkan asas tentang desentralisasi fiskal dimana setiap daerah diberikan hak secara penuh untuk menentukan segala kebijakan terkait anggaran yang telah mereka miliki yang salah satu sumber utamanya berasal dari pemerintah pusat.

Islam mengajarkan akan tanggung jawab dari pemimpin untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, landasan ini setidaknya harus diterapkan dalam pemenuhan pemerintahan yang *good governance and clean government* agar semua rakyat merasakan kesejahteraan, hal ini diutarakan dalam hadis Ibnu Umar r.a. “saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seseorang kepala Negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya”.

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong peningkatan inovasi daerah untuk mengeksplorasi kekayaan daerah yang dimilikinya, sehingga hasil dari eksplorasi tersebut menjadi pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan atas kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Perilaku boros pemerintah daerah yang menguras separuh lebih anggarannya hanya untuk belanja pegawai dikhawatirkan akan mengantarkan pemerintah daerah pada kondisi kebangkrutan.

Menurut Foster, 1986; Lau, 1987; Ward, 1994; Jones and Hensher, 2004, Luo and Yu, 2011 menjelaskan bahwa *financial distress* diungkapkan sebagai kegagalan untuk memenuhi komitmen keuangan, berupa ketidaksanggupan melunasi pinjaman, kegagalan membayar dividen (atau bahkan pengurangan jumlah pembayaran dividen), kekurangan modal kerja, dan ketidakcukupan dana untuk membayar sejumlah biaya perusahaan. Sedangkan pada sektor publik, *financial distress* didefinisikan oleh Jones dan Walker (2007) sebagai ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Ketidakmampuan ini dikarenakan pemerintah tidak memiliki kecukupan dana untuk membangun infrastruktur pelayanan publik, seperti jalan, jembatan, saluran irigasi dan fasilitas publik lainnya.

Penelitian mengenai *financial distress* dipemerintahan khususnya di Indonesia masih relatif terbatas, hal ini dibuktikan dengan perkembangan penelitian dengan topik ini hanya fokus kepada sektor swasta, hal inilah yang menjadi dasar peneliti untuk mencoba memprediksi kemungkinan *financial distress* yang terjadi dipemerintah daerah di Indonesia khusus Provinsi Jawa Tengah. Beberapa penelitian terdahulu mengenai financial distress di pemerintahan menurut Jones dan Walker (2007) menggunakan dua indikator yaitu indikator keuangan yang berupa (1) besaran dana yang dialokasikan untuk membangun infrastruktur pelayanan public dan (2) rasio-rasio kinerja keuangan, sedangkan indikator non keuangan terdiri dari (1) karakteristik dewan dan (2) kualitas pelayanan public. Menurut pakar ekonomi Islam al-Maqrizi (766-845 H), bahwa kecerobohan pemerintah (korupsi, administrasi birokrasi yang buruk) dalam mengelola anggaran dalam hal ini dana perimbangan sebagai sumber malapetaka dan krisis ekonomi. Maka selain kekayaan “diperlukan ketaqwaan dalam aktifitas dan kebijakan ekonomi,” kata Yahya bin Umar (213-289 H). Ketakwaan merupakan asas ekonomi Islam. Itulah yang akan mendatangkan keberkahan dan kemakmuran (QS. Al-A’raf ayat 96).

Penelitian ini mempunyai tujuan utama memprediksi *financial distress* di pemerintah daerah dengan hanya mengukur dari sisi keuangan yang menggunakan analisis dari kemandirian pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatannya, keselarasan pembelanjaan yang dilakukan pemerintah daerah yang tidak hanya terfokus pada belanja rutin serta rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah. Indikator ini digunakan dengan mempertimbangkan teori dan kondisi di Indonesia.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Hadist tentang Kesejahteraan Ummat

Hadis pertama dari Ibnu Umar r.a. berkata: saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan

seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) dari hal yang dipimpinnya. (buchar, muslim).

Hakekat kepemimpinan adalah tanggung jawab dan wujud tanggung jawab adalah kesejahteraan, maka, presiden dalam memimpin negerinya bukan hanya sebatas menjadi pemimpin “pemerintah” saja, namun tidak ada upaya serius untuk mengangkat rakyatnya dari jurang kemiskinan menuju kesejahteraan, maka presiden tersebut belum bisa dikatakan telah bertanggung jawab.

Hadis kedua dari Abu Maryam al’ azdy r.a berkata kepada Muawiyah: saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: siapa yang diserahkan oleh Allah mengatur kepentingan kaum muslimin, yang kemudian ia sembunyi dari hajat kepentingan mereka, maka Allah akan menolak hajat kepentingan dan kebutuhannya pada hari qiyamat. Maka kemudian Muawiyah mengangkat seorang untuk melayani segala hajat kebutuhan orang-orang (rakyat). (Abu Dawud, At-Tirmidzi).

Hadis tersebut dalam konteks pemerintahan adalah sosok “pelayan” yang bertugas untuk memenuhi kepentingan “tuan” rakyat ini adalah Presiden, Menteri, DPR, MPR, MA, Bupati, Walikota, Gubernur, Kepala Desa, dan semua birokrasi yang mendukungnya. Mereka ini adalah orang-orang yang kita beri kepercayaan (tentunya melalui pemilu) untuk mengurus segala kepentingan dan kebutuhan kita sebagai rakyat. Karena itu, bila mereka tidak melaksanakan tugasnya sebagai pelayan rakyat, maka kita sebagai “tuan” berhak untuk “memecat” mereka dari jabatannya.

Hadis yang ketiga yaitu dari Abu Hunaidah (wa’il) bin Hadrj r.a. berkata: Salamah bin Jazid al-Ju’fy bertanya kepada Rasulullah SAW: ya Rasulullah, bagaimana jika terangkat di atas kami kepala-kepala yang hanya pandai menuntut haknya dan menahan hak kami, maka bagaimanakah kau menyuruh kami berbuat?. Pada mulanya Rasulullah mengabaikan pertanyaan itu, hingga ditanya kedua kalinya, maka Rasulullah SAW bersabda: dengarlah dan ta’atilah maka sungguh bagi masing-masing kewajiban sendiri-sendiri atas mereka ada tanggung jawab dan atas kamu tanggung jawabmu. (H.R. Muslim).

Penjelasan dari hadis ini adalah Rakyat memiliki hak dan pemimpin memiliki tanggung jawab. Begitu pula sebaliknya, rakyat memiliki tanggung jawab dan pemimpin juga memiliki hak, antara keduanya harus ada keseimbangan dan kesetaraan yang satu tidak boleh mendominasi yang lain, akan tetapi kekuasaan sepenuhnya adalah tetap berada di tangan rakyat, karena hakekat kepemimpinan hanyalah amanat yang harus diemban oleh seorang pemimpin bila sang pemimpin tidak bisa menjaga amanat itu dengan baik, maka kekuasaan kembali berada di tangan rakyat.

Oleh sebab itu, mengingat kesetaraan posisi rakyat dan pemimpin ini, maka masing-masing memiliki hak dan tanggung jawabnya. Hadis di atas menjelaskan bahwa seorang pemimpin jangan hanya bisa memenuhi haknya, dan mengabaikan hak rakyatnya, akan tetapi seorang pemimpin harus mengakui dan menjamin hak-hak rakyatnya secara bebas.

Financial Distress

Menurut Jones dan Walker (2007), *financial distress* merupakan ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan pada publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Ketidakmampuan pemerintah ini karena pemerintah tidak mempunyai ketersediaan dana untuk diinvestasikan pada infrastruktur yang digunakan dalam penyediaan pelayanan pada publik tersebut. Kondisi kekurangan atau ketidaktersediaan dana ini mengindikasikan bahwa pemerintah mengalami kesulitan keuangan.

Financial distress pemerintah daerah dalam penelitian ini didefinisikan sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan baik pokok maupun bunga pinjaman. Kemampuan yang dimaksud dapat diindikasikan dengan *debt service coverage ratio* (DSCR)

sebagaimana diatur dalam PP No. 54/2005 tentang pinjaman daerah. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah jika mempunyai tingkat DSCR minimal 2,5 (dua setengah). Bagi pemerintah daerah yang tidak mampu mencapai tingkat DSCR tersebut, tidak diperbolehkan untuk melakukan pinjaman daerah karena dikuatirkan akan mengembalikan baik pokok maupun bunga pinjaman. Apabila pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk mengembalikan pokok dan bunga pinjaman (mempunyai DSCR kurang dari 2,5) dapat dinyatakan dalam status *financial distress*.

Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam hal pembayaran pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan kemampuan masyarakat dalam hal pembayaran pajak dan retribusi daerah, mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat.

Secara konsepsional, pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antar pemerintah daerah, terutama dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, dapat dilakukan dengan cara mengukur kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan daerah. Menurut Halim (2002, dalam Suprpto, 2006) terdapat empat macam pola yang memperkenalkan “hubungan situasional” dalam pelaksanaan otonomi daerah, antara lain:

- a. Pola hubungan *instruktif*, yaitu pola hubungan dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.
- b. Pola hubungan *konsultatif*, yaitu pola hubungan dimana campur tangan pemerintah sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu untuk melaksanakan otonomi daerah.
- c. Pola hubungan *pertisipatif*, yaitu pola hubungan dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat tingkat kemandirian daerah melebihi 50%, sehingga daerah yang bersangkutan lebih mendekati mampu untuk melaksanakan otonomi daerah.
- d. Pola hubungan *delegatif*, merupakan pola hubungan dimana campur tangan pemerintah pusat tidak lebih dari 25%, bahkan nyaris tidak ada.

Pertumbuhan PAD

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi daerah mana yang perlu mendapatkan perhatian.

Keselarasan Belanja

Rasio pengelolaan belanja menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki ekuitas antara periode yang positif yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan adanya surplus atau defisit anggaran. Surplus atau defisit yaitu selisih lebih/ kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan.

Belanja Pemerintah Daerah

Pelaksanaan operasional dari pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan secara merata maka dibutuhkan penataan system pengeluaran dan pembelanjaan yang tepat guna. Menurut Halim (2007) menyatakan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah mengurangi nilai kekayaan bersih.

Kemudahan dalam menentukan penempatan biaya atau belanja yang tepat sesuai program dan kegiatan dari pemerintah daerah maka diperlukan pengklasifikasian, berikut menurut Darise, 2008 belanja dibagi menjadi dua kategori:

1. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang penganggarannya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja terdiri dari:
 - a) belanja pegawai,
 - b) Belanja bunga,
 - c) Belanja Subsidi,
 - d) Belanja Hibah,
 - e) Belanja Bantuan Sosial,
 - f) Belanja Bagi Hasil,
 - g) Belanja Bantuan Keuangan,
 - h) Belanja Tidak Terduga,
2. Belanja Langsung, merupakan belanja yang penganggarannya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :
 - a) Belanja Pegawai,
 - b) Belanja Barang dan Jasa,
 - c) Belanja Modal,

Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Pada pemerintah daerah, kekuatan (*power*) sumber daya keuangan dapat tercermin dari besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah tersebut. Menurut Undang- Undang, Pemerintah daerah memiliki tiga komponen sumber pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain Lain. Pemerintah daerah Yang memiliki Pendapatan Asli Daerah rendah akan membutuhkan dana dari sumber lain untuk memenuhi kebutuhannya. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sumber dana tersebut diantaranya dapat berasal dari dana transfer pemerintah pusat/provinsi (dana perimbangan).

Sesuai pandangan teori ketergantungan sumber daya, pemerintah daerah yang memiliki kemandirian sumber daya keuangan akan memiliki kekuatan untuk *survive* dan terhindar dari financial distress. Kemandirian keuangan juga telah digunakan oleh peneliti terdahulu sebagai indikator dalam menilai kinerja keuangan pemerintah (Cheng, 1992; Christiaens, 1999; Christiaens dan Pateghem, 2007). Kloha, Weissert, dan Kleine (2005)

Financial distress sering dikaitkan dengan utang. Utang pemerintah merupakan bagian penting dalam pendanaan pemerintah. Utang pemerintah dapat digunakan sebagai penopang dalam pembiayaan pembangunan di daerah jika pendapatan asli daerah dan transfer pemerintah pusat tidak mencukupi kebutuhan dana pemerintah daerah (Halim dan Damayanti, 2008). Menurut PP No. 54/2005 tentang Pinjaman Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman baik pada pemerintah pusat maupun pihak ketiga. Jika utang dilakukan pada pemerintah pusat, maka bunga dan syarat pengembalian utang dilakukan dengan fleksibel dalam arti bunga pinjaman rendah dan dalam hal pengembalian dapat dinegosiasikan. Berbeda dengan pinjaman pada pemerintah pusat, jika pinjaman dilakukan pada pihak ketiga (perbankan), maka perlakuan utang pemerintah sama halnya dengan pinjaman pada sektor swasta.

Salah satu indikator *financial distress* adalah jumlah utang yang tinggi (Almilia, 2006). Rasio yang mengukur kemampuan entitas dalam mengembalikan utang lancar adalah rasio likuiditas yang dapat dinyatakan dengan *current ratio*. Entitas dengan likuiditas yang tinggi mengindikasikan bahwa entitas bersangkutan mempunyai jumlah aktiva lancar yang cukup untuk memenuhi kewajiban lancar ketika jatuh tempo tanpa mengganggu jalannya operasional secara signifikan. Sebaliknya, likuiditas yang rendah mengindikasikan bahwa entitas mempunyai jumlah aktiva lancar yang tidak mencukupi untuk menjamin pembayaran kewajiban lancar ketika jatuh tempo sehingga dapat berpengaruh pada *financial distress*. Platt dan Platt (2002) dan Almilia dan Kristijadi (2003) membuktikan bahwa rasio likuiditas berpengaruh terhadap *financial distress* perusahaan.

Beberapa penelitian pada sektor pemerintahan yang menggunakan proporsi utang dilakukan Ryan et al. (2000) dengan hasil bahwa *indebtednes* memberi penggambaran kesehatan keuangan pemerintah daerah dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Sementara itu, Groves et al. (2001) menggunakan rasio terkait kewajiban berupa *debt structure* dan *unfunded liabilities* untuk memberi penggambaran kewajiban pemerintah terkait kemampuan pembayaran kewajiban pemerintah dalam penelitian yang dilakukannya. Bukti empiris yang diperoleh adalah pemerintah dengan kewajiban yang tinggi berkecenderungan untuk mempunyai kinerja yang lebih baik dibanding pemerintah yang mempunyai jumlah utang yang rendah. Cohen (2006) menggunakan rasio terkait kewajiban keuangan pemerintah berupa *debt to equity ratio* dan *long term liabilities to total assets* dalam memprediksi kinerja pemerintah daerah di Yunani. Hasil penelitian ini adalah bahwa rasio utang pemerintah berpengaruh pada kinerja pemerintah walaupun dalam pengaruh yang rendah. Steven dan McGowen (1983) menggunakan *total debt to total revenue ratio* untuk menggambarkan solvabilitas pemerintah yang dihubungkan dengan kinerja keuangan pemerintah. Selain itu, Groves et al. (2001) menggunakan *long term to total asset ratio* yang diasosiasikan dengan kinerja pemerintah daerah. Jones dan Walker (2007) dan Sutaryo et al., (2010) menggunakan *total debt to total asset* sebagai *explanatory variable* dalam pengujian *distress* pemerintah.

Penelitian ini menggunakan rerangka pengujian data status *financial distress* dua tahun setelah pelaporan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun tiap akhir tahun tertentu dan harus disampaikan ke pemerintah pusat selambat-lambatnya 6 bulan dari tanggal pelaporan. Setelah itu, laporan keuangan pemerintah daerah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah daerah dipublikasi, diakses dan dianalisis oleh pemakai laporan keuangan pada tahun kedua setelah pelaporannya. Selain itu, pengaruh dari hasil realisasi anggaran (surplus/ defisit) terjadi pada dua tahun setelah pelaporan dilakukan.

Atas dasar dari penjelasan diatas dan penelitian terdahulu maka bisa dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut:

Ha : Rasio Kemandirian, Keselarasan Belanja dan Pertumbuhan PAD mempunyai kemampuan untuk memprediksi status *Financial Distress* di Pemerintah Daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Sampel dalam penelitian ini dari laporan keuangan kabupaten/kota di Jawa Tengah diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*, kriteria yang akan digunakan harus mencakup hal-hal berikut ini:

1. Data yang digunakan adalah data tahun 2013-2016 dari laporan keuangan daerah di kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah.

2. Data tersedia di Badan Pusat Statistik ataupun data di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Operasional Variabel Penelitian

Pada penelitian ini terdapat 4 (empat) variabel yang akan diujikan, yaitu satu variabel *dependent* (terikat) *Financial distress* (Y), serta 3 (tiga) variabel *independent* (bebas) yaitu: Kemandirian Keuangan (X 1), Keselarasan Belanja (X2), Pertumbuhan PAD (X3),

- **Kemandirian Keuangan:** Kemandirian keuangan yang lebih tinggi menunjukkan ketergantungan daerah yang lebih rendah terhadap pihak lain yang dapat memberikan dana perimbangan dan pinjaman.

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan} + \text{Pinjaman}}$$

- **Keselarasn Belanja:** keselarasn belanja yang lebih rendah menunjukkan bahwa anggaran belanja semakin banyak dialokasikan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan program pemerintah daerah.

$$\frac{\text{Belanja Tidak Langsung}}{\text{Belanja Langsung}}$$

- **Pertumbuhan PAD:** pertumbuhan PAD yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan daerah yang lebih baik dalam memperoleh PAD dibandingkan dengan periode sebelumnya.

$$\frac{\text{PAD}_t - \text{PAD}_{(t-1)}}{\text{PAD}_{t-1}}$$

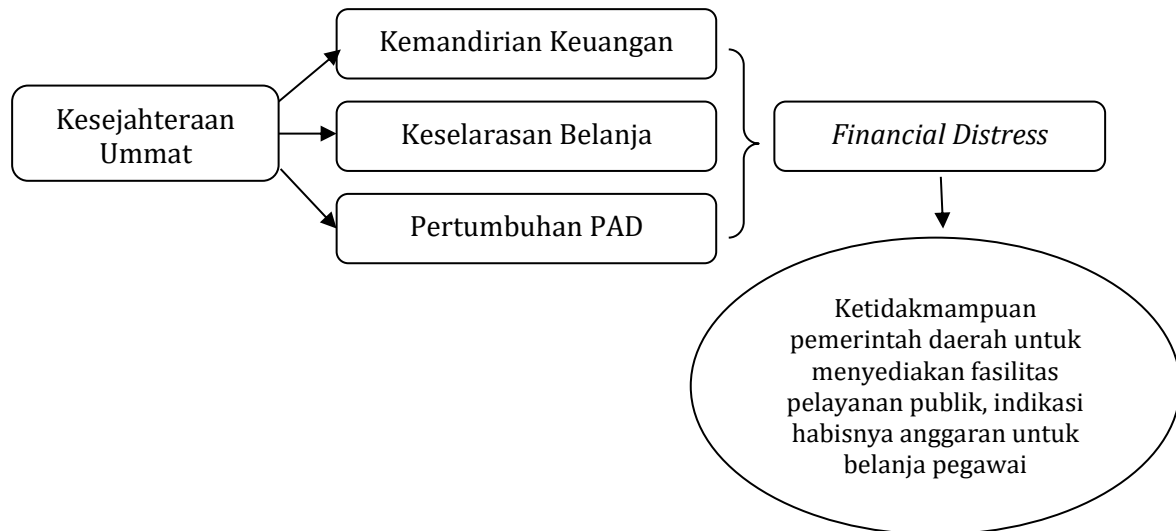
- **Financial Distress:** Indikasi *financial distress* dalam penelitian ini dilihat dari porsi realisasi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran. Apabila pemerintah menghabiskan sebagian besar anggaran yang dimilikinya untuk belanja yang bersifat rutin (belanja operasi) maka dikhawatirkan Pemda tidak lagi memiliki kecukupan dana untuk kebutuhan membangun infrastruktur pelayanan publik, seperti membangun sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya.

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Angka ideal untuk rasio belanja modal terhadap total belanja tidak diatur oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengatur sendiri porsi belanja daerah. Pada umumnya rasio belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara

5-20% (Mahmudi, 2010). Namun, dalam rapat koordinasi, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (2013) meminta agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja modal sekurang-kurangnya 30% dari total belanja. Tujuannya agar dapat mendorong pembangunan infrastruktur dan sesuai dengan Perpres No.5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (<http://www.antaranews.com>).

Model Penelitian



Metode Pengujian Hipotesis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik biner (*binary logistic regression*) dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 19. Regresi logistik biner digunakan apabila variabel dependennya berupa variabel dikotomi atau variabel biner. Dalam penelitian ini, *financial distress* merupakan variabel dikotomi yang memiliki dua tingkatan berbeda, yaitu pemerintah daerah yang mengalami *financial distress* dan pemerintah daerah yang tidak mengalami *financial distress*. Selain untuk melihat pengaruh sejumlah variabel independen terhadap variabel dependen yang berupa variabel response biner, regresi logistik biner juga biasa digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel dependen y (yang berupa variabel biner) berdasarkan nilai variabel-variabel independen x_1, x_2, \dots, x_k .

Model *regresi logistik* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Log} \left(\frac{P}{1 - p} \right) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana p adalah kemungkinan bahwa $Y=1$ (*financial distress*), dan X_1, X_2, X_3 , adalah variabel independen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah yang telah mempublikasikan laporan realisasi anggaran dari tahun 2013 sampai 2016. Terdapat total 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dan sampel ditemukan sebanyak 28 kabupaten/kota, jumlah tersebut didasarkan pada kriteria pengambilan sampel dimana ada 7 Kabupaten/Kota yang tidak ditemukan data terkait laporan realisasi anggaran selama 2013-2016.

Hasil Uji Hipotesis

-2 log likelihood

Nilai -2 log likelihood digunakan untuk melihat kelayakan model yang telah digunakan, yang caranya dilakukan dengan membandingkan nilai -2 log likelihood sebelum ditambah variabel independen dengan nilai -2 log likelihood setelah ditambah variabel independen.

Tabel 4.1
Overall Model Fit

Keterangan	-2 log likelihood
Block Number = 0	76,272
Block Number = 1	76,272

Dari tabel 4.1 dilihat bahwa nilai -2 likelihood 76,272 signifikan pada alpha 5% sedangkan pada tabel 4.2. diperoleh nilai chi-square sebesar 65,117 yang berarti angka ini signifikan secara statistic dan berarti model ini fit dengan data.

Tabel 4.2
Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	65.117	3	.000
	Block	65.117	3	.000
	Model	65.117	3	.000

Sumber: data diolah 2017

Nagelkerke R²

Nilai nagelkerke R Square sebesar 0,893 menunjukkan bahwa 89,3% variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya sebanyak 10,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Tabel 4.3
Nagelkerke R²
Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	11.155 ^a	.441	.893

a. Estimation terminated at iteration number 13 because parameter estimates changed by less than .001.

Sumber: Data diolah 2017

Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test

Teknik pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah model empiris cocok atau sesuai dengan model penelitian. Hasil uji ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test
Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	.012	8	1.000

Sumber: data diolah 2017

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 1,000 yang tentunya lebih besar dari pada 0,05 dan mempunyai makna bahwa model dapat diterima karena cocok dengan data yang telah dilakukan peneliti.

Classification Table

Tabel 4.5. menunjukkan nilai estimasi *financial distress* dan *non financial distress*, terdapat 100 pemerintah kabupaten/kota yang diprediksi mengalami *financial distress*, namun hasil observasi menunjukkan 98 yang mengalami *financial distress* dan hanya 2 yang diprediksi tidak tepat sebagai *non financial distress*. Jadi ketepatan prediksi *financial distress* adalah 98/100 (98,0%).

Pemerintah kabupaten/kota yang diprediksi tidak mengalami kesulitan keuangan (*non financial distress*) sebanyak 12, akan tetapi hasil observasi menunjukkan hanya 11 yang tidak mengalami *financial distress*, sedangkan sisanya 1 diprediksi secara tidak tepat sebagai *financial distress*. Jadi ketepatan prediksi *non financial distress* adalah 11/12 (91,7%). Secara keseluruhan tingkat ketepatan prediksinya adalah sebesar 97,3%.

Tabel 4.5
Classification Table
Classification Table^a

Observed			Predicted		
			FD		Percentage Correct
			.00	1.00	
Step 1	FD	.00	98	2	98.0
		1.00	1	11	91.7
	Overall Percentage				97.3

a. The cut value is .500

Sumber: data diolah 2017

Estimasi Parameter dan Interpretasinya

Tabel 4.6
Hasil Klasifikasi Kesalahan Tipe I dan Tipe II

Klasifikasi	Jumlah	Presentase (%)
Estimasi yang benar	109	97,3%
Kesalahan Tipe I	2	1,8%
Kesalahan Tipe II	1	0,9%
Total	112	100%

Sumber: data diolah 2017

Pengaruh Kemandirian Keuangan Terhadap *Financial Distress*

Hasil pengujian variabel kemandirian keuangan ditemukan nilai signifikansi sebesar 0,155 dan koefisien 0,052. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 menunjukkan kemandirian keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Pengaruh Keselarasan Belanja Terhadap *Financial Distress*

Hasil pengujian dari variabel keselarasan belanja ditemukan nilai signifikansi sebesar 0,156 dan koefisien 0,032. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 menunjukkan keselarasan belanja tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Terhadap *Financial Distress*

Hasil pengujian dari variabel pertumbuhan PAD ditemukan nilai signifikansi sebesar 0,152 dan koefisien -0,043. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 menunjukkan pertumbuhan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Sedangkan koefisien menunjukkan angka negatif yang berarti semakin tinggi peningkatan PAD maka semakin kecil kemungkinan *financial distress*.

Kesimpulan

Hasil pengolahan data melalui SPSS terhadap 112 data dari pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2013-2016 memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari 112 sampel yang diolah diketahui bahwa ada sebanyak 109 sampel diprediksi mengalami *financial distress*, hal ini berarti sebesar 97,3% pemerintah daerah mengalami *financial distress* dikarenakan besarnya realisasi anggaran yang telah mereka lakukan dari tahun 2013-2016

cenderung hanya terfokus pada belanja pegawai dan operasional daerah tetapi minim pada belanja infrastruktur atau belanja modal.

2. Dari tiga hipotesis tidak ada yang signifikan.

Keterbatasan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan ditemukan beberapa keterbatasan yaitu:

1. Penelitian ini hanya mengambil sampel kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah sehingga penelitian selanjutnya diharapkan bisa mengambil sampel yang lebih luas.
2. Ukuran penentuan kategori *financial distress* dalam penelitian ini hanya sebatas pada data kuantitatif saja dengan focus pada perbandingan masing-masing belanja pemerintah daerah.

REFERENSI

- Azhar, MHD Karya Satya. 2008. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah*. Tesis. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Clark, T. N., 1977. Fiscal Management of American Cities: Funds Flow Indicators, *Journal of Accounting Research*, Vol. 15 (Supplement).
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : PT. Indeks.
- Elmi, Bacrul. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. UI-Press. Jakarta
- Erlina. 2011. *Metodologi Penelitian*. USU Press. Medan
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gujarati, Damodar, 2006. *Ekonometrika Dasar*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Halim, Abdul. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Jones, Stewart dan R., G., Walker. 2007. Explanators of Local Government Distress. *ABACUS*. 43(3): 396-418.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. “*Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*”. Makalah. Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat.
- Padovani, Emanuele, Francesca Manes Rossi dan Rebecca Levy Orelli. 2010. *The Use of Financial Indicators to Determine Financial Health of Italian Municipalities*. Toulouse.
- Peraturan Pemerintah No.104/2000 Tanggal 10 November 2000 Tentang *Dana Perimbangan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2000 tentang “*Pinjaman Daerah*”

- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang “*Standar Akuntansi Pemerintahan*”
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang “*Standar Akuntansi Pemerintahan*”
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. ”
- Plummer, E., Hutchison, P., dan Patton, T. 2007. GSAB No. 34’s Government Financial Reporting Model: Evident on Its Information Relevan. *The Accounting Review*. 82(1): 205-240.
- Priyatno, Dwi. 2008. *Mandiri Belajar SPSS*. MediaKom.Yogyakarta
- Ryan, Christine, Dunstan, Keitha, dan Robinson, Marc dan Grigg, Trevor. 2000. *Financial Performance Indicators for Australian Local Governments*. *Accounting, Accountability and Performance* 6(2): 89-106.
- Solihin, Dadang. 2011. Reformulasi Desentralisasi Fiskal dalam Instrumen DAU, DAK dan DBH. (<http://www.slideshare.net/DadangSolihin/reformulasidesentralisasi-fiskal-dalam-instrumen-dau-dak-dan-dbh>).
- Sutaryo, Bambang, S., dan Doddy, S. 2010. Nilai Relevan Informasi Laporan Keuangan Terkait Financial Distress Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto, 13-14 Oktober.
- Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tetang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang 25 tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Undang-Undang no. 28 tahun 1999 Tentang *Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN*.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Undang-Undang 58 Th 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- www.bps.go.id.
- www.djpk.depkeu.go.id.